

BAB II

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI MESIR

Dinamika partisipasi politik perempuan di Mesir khususnya di tingkat parlemen tidak terlepas dari sistem keterwakilan yang diterapkan dalam parlemen Mesir. Sejarah mencatat bahwa seiring dinamika politik dan pemerintahan yang disertai dengan pergantian antar rezim, Mesir berulang kali mengalami perubahan sistem parlemen termasuk didalamnya menyangkut ketentuan sistem keterwakilan dalam parlemen Mesir.

A. Sistem Politik Mesir

1. Sistem Parlemen Mesir

Kehidupan parlemen di Mesir telah menjadi petanda peradaban Mesir di sepanjang sejarahnya. Dalam sejarah modern, kehidupan parlemen dimulai sejak tahun 1824 sementara sistem keterwakilan dalam parlemen telah mulai sejak tahun 1866. Saat ini, sistem parlemen Mesir menggunakan sistem bikameral, terdiri dari Majelis Rakyat dan Dewan Syura. Mesir dikenal telah memulai kode administratif dan legislatif dalam sejarah awal peradabannya. Sepanjang sejarahnya, budaya dan peradaban manusia yang tangguh menawarkan bentuk yang paling canggih dari tata kelola dan manajemen pemerintahan. *Pharaoniccivilization* meletakkan dasar tata kelola dan manajemen pemerintahan. Firaun, di atas hirarki negara, ditunjuk sebagai pejabat tinggi pemerintah. Sebuah sistem pemerintahan yang layak telah berlaku sejak dinasti ketiga dan keempat,

beberapa ketentuan hukum yang dibuat berkaitan dengan pembatasan jam kerja khususnya bagi petani dan kaum buruh, sementara yang lain masih dihadapkan pada sistem kerja paksa. Setelah Alexander Agung menginvasi Mesir pada tahun 330 SM, zaman Helenistik dimulai, yaitu pencampuran antara peradaban Mesir dan Yunani. Setelah kematiannya, era Ptolemy mulai untuk digulingkan oleh Penguasa Roma.¹⁷

Meskipun pemerintahan Romawi mengalami kemunduran, Mesir telah mempertahankan sebagian besar tradisi masing-masing, aturan, dan norma-norma sebelum terjadinya proses kristenisasi tersebar luas di paruh pertama abad pertama, ditandai dengan gereja mengadopsi kebiasaan intrinsik dan adat istiadat Mesir kuno. Selama era Islam, pemerintahan dan perundang-undangan terutama diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan para ulama menjadi salah satu prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Ketika Kairo menjadi ibukota kekhalifahan Fatimiyah (969-1171) pemerintahan dan perundang-undangan telah dikembangkan. Selain itu, kota Kairo menjadi ibukota Mesir dalam kekhalifahan Islam. Sepanjang era Dinasti Ayyubiyah (1171-1250), The Citadel Kairo menjadi markas dan pusat kekuasaan. Dewan legislatif dan yudikatif telah dipisahkan, dan ada sebuah dewan keadilan untuk mengurus keluhan masyarakat Mesir dalam mencari keadilan. Tugas mereka melibatkan hukum serta perjanjian dengan negara-negara asing.¹⁸

¹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Egyptian_parliament, diakses 16 Februari 2013.

¹⁸ *Loc. cit.*, diakses 16 Februari 2013.

Dalam era kekuasaan Mamelouk (1250 - 1517) dibawah kepemimpinan Sultan El-Zaher Baibars, Mesir telah membangun Pengadilan Pemerintah di El-Deen El-Ayoubi, salah satu benteng utama pertahanan Mesir. Kompetensinya meliputi penegakan hukum, penyelesaian perselisihan, dan negosiasi dengan negara-negara terdekat. Selama era Ottoman, (1517 - 1805) pengadilan Islam merupakan sistem peradilan yang diterapkan. Hakim memiliki vonis langsung didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) sejauh sengketa perdata dan pidana yang bersangkutan. Hal ini berlaku terus sampai akhir abad ke-18. Dengan demikian, Mesir telah menjadi tempat penting berkembangnya sistem politik dan sosial negara.¹⁹

Pada tahun 1795, hampir enam tahun setelah Revolusi Perancis, pemberontakan politik besar-besar telah terjadi guna menuntut hak-hak, kebebasan dan keadilan. Ini membawa kekuatan nasional bersama dan kepemimpinan populer dalam mendukung tuntutan nasional untuk keadilan, kesetaraan dan kebebasan. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap penguasa Ottoman, Wali dan (Mamloukes) Mesir telah diambang pemberontakan berskala besar. Hal ini menyebabkan Ulama menetapkan dokumen tertulis yang diuraikan berdasarkan hubungan individu dan penguasa guna mencegah kenaikan pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat terutama pejabat (Ulama).²⁰

¹⁹ *Loc. cit.*, diakses 16 Februari 2013.

²⁰ *Loc. cit.*, diakses 16 Februari 2013

Setelah akhir Perang Dunia I, pada tahun 1919 pecah Revolusi Mesir yang menyerukan kebebasan, kemerdekaan dan demokrasi. Revolusi ini berlangsung hingga 28 Februari 1922 yang menjadi titik awal pengakuan Mesir sebagai negara merdeka (dengan beberapa reservasi) dan berakhirnya protektorat Inggris. Berdasarkan pada status baru, Konstitusi Baru Mesir diresmikan pada April 1923 oleh sebuah komite yang terdiri dari 30 anggota legislatif yang mencakup wakil-wakil dari partai politik, serta pemimpin gerakan nasional.

Konstitusi Mesir 1923 adalah konstitusi yang merupakan hasil kerja sebelumnya selama periode 1923 - 1952. Ia digantikan oleh Konstitusi 1930 untuk jangka waktu 5 tahun (1930 - 1935) sebelum dikembalikan pada tahun 1935. Ini mengadopsi sistem perwakilan parlemen berdasarkan pemisahan dan kerjasama antara otoritas. Sistem parlemen bikameral terdiri dari Senat dan DPR. Selama periode 1923 - 1952 Mesir menyaksikan pengalaman yang luar biasa dalam praktek politik dan demokrasi, namun ditandai dengan banyaknya catatan buruk seperti pendudukan Inggris, intervensi asing dalam urusan Mesir dan gangguan istana kerajaan dalam kehidupan politik.

Menurut UUD 1923, Parlemen Mesir adalah bikameral, terdiri dari Senat dan DPR. Konstitusi juga mengadopsi prinsip kompetensi yang sama untuk dua rumah dengan beberapa pengecualian. Semua anggota DPR itu harus dipilih, untuk masa jabatan 5 tahun. Di sisi lain, tiga perlima dari para anggota Senat yang terpilih, dan sisanya ditunjuk.

Jumlah anggota bervariasi sepanjang tahun konstitusi itu berlaku. DPR, memiliki 214 anggota pada periode 1924-1930, kemudian menjadi 235. Mengalami penurunan kembali dibawah UUD 1923 yang terus berlaku selama periode 1931 - 1934 menjadi 150 orang. Kemudian mengalami peningkatan kembali dibawah UUD 1923 menjadi 232 orang untuk periode 1936 - 1938. Kemudian jumlah anggota menjadi 264 orang pada tahun 1938 - 1949. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi 319 pada tahun 1950 dan sampai dengan terjadinya Revolusi Mesir tahun 1952. Meskipun parlemen yang dibentuk oleh konstitusi tahun 1923 merupakan langkah maju jalannya demokrasi dan perwakilan di Mesir. Namun, praktek kehidupan banyak diwarnai dengan catatan hitam sejarah politik dan sosial masyarakat Mesir.

Kehidupan politik pada periode 1923 - 1952 mengalami pasang surut sebagai akibat intervensi oleh pasukan pendudukan dan istana, yang menyebabkan pembubaran parlemen sebanyak sepuluh kali. Selain itu, sebuah konstitusi baru dikeluarkan pada tahun 1930, dan berlangsung selama lima tahun. Ini menjadi kemunduran kehidupan demokrasi sampai konstitusi 1923 yang kembali diberlakukan pada tahun 1935. Dengan demikian, kondisi konstitusional memburuk karena alasan internal dan eksternal. Kerusakan ini tercermin dalam keadaan ketidakstabilan politik dan pemerintahan Mesir menuju era demokrasi.

2. Sistem Pemilihan Umum di Mesir

Pada periode 1984 - 2005, Mesir memiliki 3 sistem pemilu yang berbeda, yaitu : (a) *List Proportional Representation (PR) System, Party Centred Proportional Representation System* (pada pemilu 1984),(b) *Parallel System* dengan daftar partai dan 48 kandidat tiap distrik (pada pemilu 1987) dan (c) *The Candidate - Centred Two - Round System* (1990,1995, 2000 sampai sekarang). Tiap sistem memiliki dampak yang berbeda dalam keseluruhan dalam proses interaksi politik, keefektifan legislatif, peran pengawasan majelis dan hubungan antara partai yang berbeda dan kekuatan politik.

Pada Agustus 1983, Undang-undang Pemilu Nomor 114 Tahun 1983 dikeluarkan, yang mensyaratkan anggota pemilu dari kelompok politik melewati daftar partai berdasar pada sistem proporsional, tiap partai harus memiliki daftarnya sendiri dan daftar tunggal tidak dapat termasuk kandidat dari lebih dari satu partai. Setiap daftar harus termasuk nomor kandidat sesuai dengan kursi pemilu yang diberikan oleh distrik dan nomor yang sama dari kandidat alternatif. Pada tahun 1986, *Supreme Constitutional Court* menemukan Undang-undang Nomor 14 menjadi tidak konstitusional, sebagai sistem yang berbasis pada partai proporsional. Undang-undang Nomor 188 Tahun 1986, mengkombinasikan pemilihan yang berdasar pada kursi kandidat pusat dan daftar partai dengan pemilihan perwakilan distrik yang diberikan oleh daftar partai. Ini menahan aspek negatif dari Undang-undang Nomor 114.

Namun undang-undang ini juga dianggap tidak konstitusional dan diikuti oleh Undang-undang Nomor 201 tahun 1990, berdasar pada *candidate-centre system*, memberikan semua orang yang berkualitas untuk mendeklarasikan kandidat mereka tanpa pemaksaan. Sebagai hasilnya, partai politik dan pada akhirnya harus dihadapkan pada rintangan yang lebih besar dalam mengamankan keterwakilan.

B. Partai Politik dan Partisipasi Perempuan dalam Partai

Munculnya partai-partai politik di Mesir pada abad ke-19 merupakan hasil refleksi dari interaksi sosial, ekonomi dan budaya serta sejarah tertentu, keadaan nasional dan politik, yang mengarah pada penciptaan dan pengembangan lembaga-lembaga modern administrasi pemerintah dan masyarakat, seperti parlemen, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan pemerintahan yang modern. Kemunculan ini berlangsung secara bertahap. Partai-partai politik telah terlebih dahulu dibentuk sebagai perkumpulan rahasia yang diikuti oleh pembentukan kelompok-kelompok politik.²¹

Partai Nasional (NDP) merupakan partai politik pertama yang didirikan di Mesir pada tahun 1907 oleh Mustafa Kamil Pasha. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, ada berbagai elemen besar dalam partai-partai politik, pembentukan organisasi yang dimaksudkan untuk pencapaian kekuasaan dan basis popularitas massa dengan beragam platform yang ditawarkan. Ada partai

²¹ *Loc. cit.*, diakses 16 Februari 2013

nasional, yaitu kelompok yang didominasi oleh kalangan istana kerajaan, yang lain dibentuk oleh otoritas pendudukan serta pihak ideologi yang mengekspresikan ideologi tertentu.²²

Pada tahun 1907 - 1920, partai-partai politik yang sudah terbentuk di Mesir merupakan sinyal awal untuk penyebaran partai politik lebih lanjut, namun mereka dibatasi karena pendudukan Inggris dan subordinasi Mesir untuk Kekaisaran Ottoman. Pada bulan Februari 1922 Deklarasi Kemerdekaan Unilateral Mesir dan penerbitan Konstitusi 1923 menyebabkan pembentukan aturan konstitusi kerajaan berdasarkan pluralisme partai dan prinsip-prinsip demokrasi liberal.

Revolusi 1952 membuat pondasi untuk perkembangan nasional yang independen dalam *planning* pusat, memimpin peran untuk sektor publik dalam pengembangan dan peningkatan dalam pembagian tenaga kerja dalam penyaluran *Gross National Product* (GNP). Hal ini ditemani oleh sistem satu partai, melarang partai oposisi dan menghubungkan organisasi masa untuk badan negara. Setelah kekalahan tahun 1967, mereka mengembangkan ekonomi menjadi sistem pasar bebas dan sosial ekonomi yang berasal dari rejim mulai berangsur-angsur menghilang. Tahun 1960 - 1970 masyarakat menamainya dengan kebebasan dan demokrasi sampai pada akhirnya tahun 1976 memutuskan untuk memperbolehkan sistem multipartai.

Partai politik tidak bisa jauh dari kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, partai yang mayoritas selalu menjadi pertimbangan

²² *Loc. cit.*, diakses 16 Februari 2013

dala pembuatan kebijakan. Undang-undang politik tahun 1977, masing masing partai memiliki hak yang sama. Namun pada kenyataannya National Democrat Party (NDP) menguasai pemerintahan dan mendominasi media. Hal ini menghasilkan:

1. Karakter rejim yang masih otoriter;
2. Hukum partai politik lemah;
3. Tidak mengakui adanya oposisi yang berkembang dengan pesat;
4. Masyarakat menderita karena masalah sosial-ekonomi yang dibarengi dengan tantangan sosial dan politik yang lemah;
5. Kekuasaan berlanjut menjadi monopoli dari satu partai, meskipun pemilihan parlemen diselenggarakan secara teratur sejak 1976.

C. Sistem Keterwakilan dalam Parlemen Pasca Revolusi Mesir Tahun 1952

1. Dibawah Konstitusi 1956

Pada tahun 1956, konstitusi baru diproklamkan untuk pembentukan Majelis Nasional pada tanggal 22 Juli 1957 dengan keanggotaan dari 350 anggota yang dipilih. Namun hal itu berlaku sampai dengan 10 Februari 1958, ketika terjadi penggabungan wilayah Mesir dan Suriah yang memaksa pencabutan Konstitusi 1956.

2. Dibawah Konstitusi Sementara Republik Arab Mesir

Konstitusi Sementara Republik Arab Mesir dirumuskan pada bulan Maret 1958, dan penggabungan Majelis Nasional beranggotakan sebanyak 400 dari perwakilan Mesir dan 200 dari perwakilan Suriah. Majelis

Nasional ini pertama kali mengadakan pertemuan sidang pada tanggal 21 Juli 1960 dan berlangsung sampai dengan 22 Juni 1961. Mesir dan Suriah kemudian dipisahkan pada 28 September 1961.

3. Dibawah Konstitusi Sementara 1963

Pada bulan Maret 1964, sebuah konstitusi sementara lanjutan telah ditetapkan yang melahirkan 350 anggota terpilih dalam Majelis Nasional, separuh diantaranya setidaknya dari kelompok pekerja dan petani. Sebagai bentuk reaksi terhadap undang-undang tersebut kemudian pada bulan Juli 1961 kelompok sosialis ditambah menjadi 10 anggota yang ditunjuk oleh Presiden Republik. Majelis ini berlangsung dari 26 Maret 1964 sampai 12 November 1968. Pemilu baru diadakan pada tanggal 20 Januari 1969, dan Majelis itu berlaku sampai dengan 30 Agustus 1971.

4. Dibawah Konstitusi 1971

Konstitusi ini efektif diproklamasikan untuk memperbarui sistem perwakilan demokrasi dari aturan hukum, independensi kehakiman, dan pluralitas partai. Dibawah Konstitusi 1971, Parlemen Mesir sampai saat ini menganut sistem bikameral, terdiri dari Majelis Rakyat Mesir dan Dewan Syura, dengan keanggotaan dari 454 anggota, termasuk sepuluh anggota yang ditunjuk oleh Presiden Republik.

Pada tahun 1979, pemilu legislatif berbasis partai dilakukan untuk pertama kalinya di Mesir setelah partai politik yang dibangun dari Revolusi 1952 dan dibentuk sesuai dengan ketentuan partai politik pada tahun 1977, telah mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada tahun

1980, Dewan Syura didirikan untuk memperluas cakupan partisipasi politik dan demokrasi. Amandemen memutuskan sistem pemilihan Majelis Rakyat dalam mewujudkan representasi populer yang terbaik. Pada tahun 1983, daftar partai dan perwakilan proporsional yang diadopsi sebagai proses pemilu, dimana partai-partai politik berpartisipasi. Pada tahun 1986, undang-undang memodifikasi proses pemilihan, dasar pendaftaran partai berkaitan dengan sistem mayoritas individu. Namun, pengalaman menghasilkan kembali ke sistem mayoritas individu pada tahun 1990. Republik ini dibagi menjadi 222 daerah pemilihan, dua anggota untuk masing-masing konstituen, setidaknya satu dari buruh dan petani.

Mekanisme berbeda telah digunakan untuk memperlancar jalan bagi kehadiran perempuan ke dalam parlemen di Mesir, yang mencakup empat hal berikut:²³

- a. Alokasi kursi untuk perempuan: 30 kursi di parlemen dicadangkan untuk perempuan sesuai dengan Dekrit Presiden tahun 1979;
- b. Menominasikan perempuan dalam daftar partai dan menghapuskan alokasi kursi untuk perempuan;
- c. Perempuan mencalonkan diri sebagai kandidat perorangan dalam pemilihan parlemen;
- d. Perempuan ditunjuk sebagai anggota parlemen oleh presiden, yang mempunyai hak untuk menunjuk sampai 10 anggota parlemen, proporsi yang selalu diberikan kepada perempuan.

²³ *Loc. cit.*, 29 Januari 2013.

Keempat mekanisme ini dievaluasi berdasarkan pada hubungan antara jumlah perempuan dalam parlemen, jumlah dan jenis isu yang mereka ajukan, dan berbagai hal teknis yang mereka gunakan untuk mengangkat isu-isu kesetaraan peran dan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan yang salah satu indikatornya berdasarkan tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen Mesir.²⁴

D. Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Mesir

Kondisi yang terjadi di negara Mesir, sejak tahun 1956 Undang-Undang menjamin kaum perempuan memiliki hak pilih penuh dan setara dengan kaum pria, menjadi sebuah dasar hukum yang kuat bagi hak-hak asasi perempuan di Mesir yang masih dibatasi oleh kurangnya mekanisme implementasi yang tepat untuk menjamin akses yang sama bagi kaum perempuan terhadap keadilan dan hukum. Perempuan Mesir juga memiliki pengaruh yang terbatas pada tingkat nasional dan komunitas, meskipun mengisi posisi kepemimpinan sebagai menteri, duta besar, pimpinan media, anggota parlemen dan dosen universitas. Keterwakilan perempuan di parlemen Mesir telah menjadi isu perdebatan selama beberapa tahun.

Sebelum, selama dan setelah revolusi, perempuan memainkan peran penting dalam memobilisasi warga, mengorganisir dan memimpin protes, mengkoordinasi berbagai kegiatan di balik layar, dan mengobati luka-luka para korban unjuk rasa baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah

²⁴ *Loc. cit.*, 29 Januari 2013.

penduduk. Banyak wanita berharap bahwa adanya pengakuan publik terhadap peran mereka dalam revolusi yang akan diterjemahkan sebagai peluang besar bagi kepemimpinan politik. Pemilihan parlemen yang berlangsung pada periode 2011/2012 menjadi ujian konsistensi keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 2.1. berikut ini.²⁵

Tabel 2.1.
Dinamika Keterwakilan Perempuan di Parlemen Mesir

Tahun	Jumlah Perempuan yang Terpilih dalam Pemilu	Jumlah Perempuan yang Ditunjuk oleh Presiden	Total Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
1979 (11 November – 21 April)	4	2	1.6%
1979 (23 Juni – 20 Maret 1984)	33	2	9.7%
1984 – 1987	35	1	7.8%
1987 – 1990	14	4	3.9%
1990 – 1995	7	3	2.2%
1995 – 2000	9	4	2%
2000 – 2005	7	4	2.4%
2005 – 2010	4	5	2%
2010	65	1	13%
2011/2012	7	2	2.2%

Sumber: data dikutip dari Rabi'e (2012) dan Tadros (2010) dalam <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/INF30.pdf>, diakses 18 Februari 2013

1. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tingkat Parlemen

Sejak memperoleh hak partisipasi politik pada tahun 1956, keterwakilan perempuan dalam badan-badan terpilih bervariasi, tetapi umumnya masih bersifat marginal, berfluktuasi antara 0,5 - 2,4 persen. Setelah pemerintah memperkenalkan kuota nominasi 30 kursi pada tahun

²⁵ <http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/INF30.pdf>, diakses 18 Februari 2013.

1979, perempuan menduduki 9 persen dari kursi parlemen di tahun 1979 – 1984. Keterwakilan perempuan di Dewan Syura telah meningkat selama bertahun-tahun, yaitu berturut-turut sebesar 3,3% pada tahun 1980, menjadi 5,7% pada tahun 1996 dan 2002, dan mengalami peningkatan hingga mencapai 8% pada tahun 2007. Peningkatan keterwakilan perempuan di tingkat parlementer setidaknya disebabkan oleh sebagian kewenangan Presiden ditujukan untuk menunjuk satu - sepertiga dari kursi parlemen.²⁶

Periode 1984 – 1987 merupakan masa keemasan bagi tercapainya keterwakilan perempuan tertinggi di tingkat parlemen dalam sejarah perpolitikan nasional Mesir. Pasca pencabutan kuota bagi perempuan yang diterapkan pada tahun 1986, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen mulai mengalami pasang surut. Selanjutnya, periode 1990 – 1995 mulai mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 7 anggota parlemen perempuan sedikit bertambah menjadi 9 anggota parlemen perempuan pada periode 1995 – 2000 dan mengalami pasang surut kembali sampai dengan periode 2010 yang mengalami peningkatan cukup tajam menjadi sebanyak 65 orang (13%) meskipun peningkatan ini tidak berlangsung lama seiring terjadinya gejolak politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Mesir yang memaksa Presiden Hosni Mubarak meletakkan jabatannya dari kursi kepresidenan.

²⁶ *Loc. cit.*, 18 Februari 2013.

2. Penurunan Partisipasi Politik Perempuan di Tingkat Parlemen

Penurunan keterwakilan perempuan di tingkat parlemen mulai tampak pada periode 1984 – 1987 yang sedikit mengalami penurunan sebesar 8,3 persen dibandingkan dengan periode 1979 – 1984. Pencabutan kuota pada tahun 1986, menyebabkan penurunan yang cukup tajam mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Pada pemilihan anggota parlemen tahun 2005, wanita dijamin hanya sembilan dari 454 kursi di parlemen, empat dan lima anggota yang terpilih ditunjuk oleh Presiden.

Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan parlemen, maka pada pemilihan umum tahun 2010 pemerintah menetapkan aturan kuota baru lagi. Sistem kuota akan diberlakukan selama 2 periode atau 10 tahun. Pemilu parlemen Mesir yang terakhir sejak penggulingan Hosni Mubarak menjadi sebuah catatan sejarah yang menarik dalam sejarah negara Mesir, yaitu diperolehnya kemenangan pemilu oleh kelompok Islam. Akan tetapi, kemenangan ini membawa kekecewaan yang besar bagi kaum perempuan. Sebab, hasil pemilu menunjukkan bahwa hanya akan ada sekitar 8 perempuan dari 508 kursi parlemen yang diperebutkan atau jauh dibawah angka 2% yang dipersyaratkan. Setelah Revolusi Mesir, semua kelompok ingin diwakili dan memiliki suara yang layak diperhitungkan, tetapi hanya kaum perempuan saja yang masih terpinggirkan.

Selama periode 1 tahun sejak terjadinya Revolusi Mesir, demokrasi yang baru lahir memiliki sistem kuota untuk memastikan bahwa semua kelompok mendapatkan keterwakilannya yang representatif di tingkat

parlemen. Akan tetapi, kuota bagi kaum perempuan dipandang dengan penuh kecurigaan. Banyak yang berpandangan bahwa selama rezim Presiden Hosni Mubarak, kuota keterwakilan perempuan dipandang masih tidak adil. Juga, posisi calon anggota legislatif kaum perempuan yang banyak berada dalam urutan bawah menyebabkan peluang kaum perempuan untuk menduduki kursi parlemen menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut dialami baik oleh calon anggota legislatif kelompok perempuan yang berasal dari partai Islam maupun liberal.²⁷

Perubahan sikap terhadap perempuan dalam politik merupakan perjuangan yang berat. Akar diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang lama menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Mesir. Pelecehan seksual tidak hanya berlangsung dalam lingkup kehidupan pribadi, tetapi digunakan sebagai alat penindasan politik. Kelompok perempuan mengkhawatirkan situasi ini akan semakin memburuk. Partai-partai Islam, termasuk garis keras Salafi telah memaksa kaum perempuan untuk menutupi diri mereka dari kepala sampai ujung kaki dan kembali pada kehidupan internal keluarga juga menjadi hambatan bagi kaum perempuan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.²⁸

Sebuah organisasi massa yang bergerak dibidang isu-isu feminisme, yaitu Front Nasional untuk Perempuan Mesir, juga menganjurkan kuota 30

²⁷ *Loc. cit.*, 18 Februari 2013.

²⁸ <http://www.npr.org/2012/01/19/145468365/in-egypt-new-parliament-women-will-be-scarce>, diakses 18 Februari 2013.

persen bagi perempuan pada setiap daftar pemilih. Front Nasional untuk Perempuan Mesir juga melayangkan protes terhadap sistem pemilu yang membatasi akses keterwakilan perempuan dalam parlemen. Sementara itu, kelompok oposisi yang dimotori oleh Front Nasional Keselamatan Negara (NSF) mengatakan bahwa jika memasuki pemilihan parlemen, setidaknya terdiri dari sepertiga keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Saat ini, tidak jelas apakah NSF dengan beberapa koalisi yang mendukung terwujudnya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen telah bersatu melawan partai-partai Islam yang saat ini mengalami perpecahan internal menjelang diselenggarakannya pemilu legislatif.²⁹

Tentu saja, kehadiran perempuan di parlemen tidak berarti bahwa mereka akan memiliki sikap seragam pada hak-hak perempuan. Dalam kasus parlemen yang telah dibubarkan pasca tergulingnya rezim Presiden Hosni Mubarak, perempuan yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslim konservatif dan Partai Keadilan menentang keras kuota pemilu bagi keterwakilan perempuan sebesar 30%, yang mengingatkan pada rezim Mubarak, sebab sistem kuota akan melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih.³⁰

Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi politik gender dalam parlemen Mesir. Keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2010 menjadi 2% pada tahun 2011

²⁹ *Loc. cit.*, diakses 18 Februari 2013.

³⁰ <http://besic.org/colman20130124/womenrepresentationandpoliticsinegypt/>, diakses 18 Februari 2013.

meskipun fakta bahwa jumlah perempuan yang mencalonkan diri mereka sendiri mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Selanjutnya, sebagian besar perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen mendukung agenda hak anti-perempuan, berusaha untuk membalikkan keuntungan berdasarkan undang-undang perlindungan keluarga dan anak. Strategi tindakan yang berbasis bias gender parlemen adalah sangat penting. Pengarahan ini menggunakan bukti dari penelitian tentang pencalonan perempuan di tahun 2011/2012 dan menjadi sebuah pelajaran berharga tentang cara untuk mempromosikan keadilan gender di parlemen Mesir itu.³¹

Setelah puluhan tahun partisipasi politik perempuan terhenti, revolusi Mesir yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2011 menghasilkan ledakan aktivisme di seluruh negeri, baik kaum wanita, pria, dan anak-anak di semua kelas, agama dan latar belakang mengambil bagian dalam revolusi yang berujung pada mundurnya Presiden Hosni Mubarrak.

³¹ *Loc. cit.*, 18 Februari 2013.